

ABSTRAK

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, Ganti kerugian sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Disamping itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, rancangan undang-undang, bahan dari internet, serta secara empiris dilakukan penelitian di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sampang, di Kejaksaan Negeri Sampang, dan di Kepolisian Resort Sampang.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan, 2) Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, 3) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan, 4) Upaya yang dilakukan dalam Penegakan Hukum untuk mengatasi kendala dalam Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Sampang adalah : faktor minuman keras (*alcohol*) dan faktor psikologi. Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 140/Pid.B/2019/PN Spg. tersebut diketahui bahwa terdakwa telah diadili dengan sanksi pidana, tetapi tidak mencakup tentang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penganiayaan. Kendala atau hambatan Implementasi Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang adalah : Faktor hukum sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan oleh Penegakan Hukum untuk mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sampang diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang di masa mendatang adalah : Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penganiayaan, Penggabungan Gugatan Ganti Rugi.

ABSTRACT

In the settlement of cases of criminal torture, often the law places too much emphasis on the rights of suspects or defendants, while the rights of victims are neglected, one of which is the right to compensation, which is a right that requires someone who has acted detrimentally to others to pay a sum of money or goods. to a person who has been injured, so that the loss that has occurred is deemed never to have occurred. Compensation is actually the realm of civil law, however, to realize the simple, fast and low cost principle of justice, this compensation can be combined with a criminal examination. This type of research is normative legal research supported by empirical legal research, and uses a statutory approach as primary legal material. Besides that, it also uses secondary legal materials sourced from books, articles, draft laws, materials from the internet, and empirically conducted research in the field, namely at the Sampang District Court, at the Sampang District Attorney General's Office, and at the Sampang Resort Police.

The purpose of this research is to analyze and explain: 1) What causes the Crime of Persecution, 2) Implementation of Law Enforcement of the Compensation Suit Merger in the Criminal Act of Persecution, 3) Factors that hinder the implementation of law enforcement on the merger of indemnity suit in the case of action. Torture Crime, 4) Efforts made in Law Enforcement to overcome obstacles in the Merger of Indemnity Lawsuit in the Criminal Case of Persecution in the Sampang District Court in the future.

The results showed that the causes of the crime of persecution in Sampang Regency were: alcohol and psychological factors. Implementation of Compensation Suit Merger Law Enforcement in the Criminal Case of Persecution at the Sampang District Court it is known that in the Sampang District Court decision Number: 140 / Pid.B / 2019 / PN Spg. It is known that the defendant has been tried with a criminal sanction, but does not include compensation for the victim of a criminal act of maltreatment. Constraints or obstacles to the Implementation of Law Enforcement on the Merger of Indemnity Claims in the Criminal Case of Persecution in the Sampang District Court, it is known that in the decisions of the Sampang District Court are: the legal factors themselves; law enforcement factors; factor of means or facilities that support law enforcement; community factors; cultural factors. Efforts made by Law Enforcement to overcome obstacles in the Law Enforcement of the Merger of Indemnity Claims in the Criminal Act of Persecution in the Sampang District Court, it is known that in the future Sampang District Court decisions are: through the Request for Restitution.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Persecution, Compensation Suit Merger.